

## POTRET TENAGA KERJA ANAK INDONESIA

### *THE PORTRAIT OF INDONESIAN CHILD LABOUR*

**Florentz Magdalena**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Jl. 17 Agustus No. 7, Kel Teling Atas, Kec. Wanea, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia 95119

**Email:** fmagdalena@bps.go.id

**Sukamdi**

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Jl. Kaliurang, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia 55281

**Email:** sukamdi@ugm.ac.id

**Abdur' Rofi**

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Jl. Kaliurang, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia 55281

**Email:** abdurrofi@ugm.ac.id

#### **Abstrak**

Keberadaan anak di Indonesia yang putus sekolah dan bekerja pada umur terlalu muda masih cukup banyak. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 39,87 persen anak berumur 10-17 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah lagi. Padahal, negara mengatur melalui Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk bekerja karena berkaitan erat dengan upaya melindungi hak asasi anak. Kajian ini bertujuan untuk melihat karakteristik sosial demografi tenaga kerja anak dan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga tenaga kerja anak di Indonesia yang diperoleh melalui metode analisis statistik deskriptif. Dengan menggunakan data Susenas Maret 2019 dan 2020, semua variabel yang digunakan disajikan dalam bentuk tabulasi silang. Didapatkan hasil bahwa tenaga kerja anak lebih banyak pada anak yang berada kelompok umur 16-17 tahun dibandingkan kelompok umur lebih muda yaitu sebesar 9,24 persen; lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan, yaitu mencapai 4,8 persen; dan lebih banyak berpendidikan rendah dibandingkan pendidikan tinggi, yaitu sebesar 4,21 persen. Tenaga kerja anak lebih banyak dijumpai pada rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (KRT) yang rendah daripada rumah tangga dengan tingkat pendidikan KRT yang tinggi, yakni sebesar 4,91 persen; dengan KRT berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, sebesar 5,68 persen; dengan KRT bekerja di sektor pertanian dibanding sektor lain, yaitu mencapai 6,03 persen; yang berada di daerah perdesaan dibanding perkotaan, sebesar 5,25 persen; yang menerima program perlindungan sosial dibanding bukan penerima program perlindungan sosial, sebesar 4,82 persen; dan memiliki jumlah anggota rumah tangga (ART) lebih dari lima orang dibanding kurang dari 5 orang, yaitu mencapai 4,98 persen. Dengan mengetahui karakteristik tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat sasaran untuk menarik anak dari pasar tenaga kerja.

**Kata Kunci:** tenaga kerja anak, analisis deskriptif, perlindungan anak, Indonesia.

## Abstract

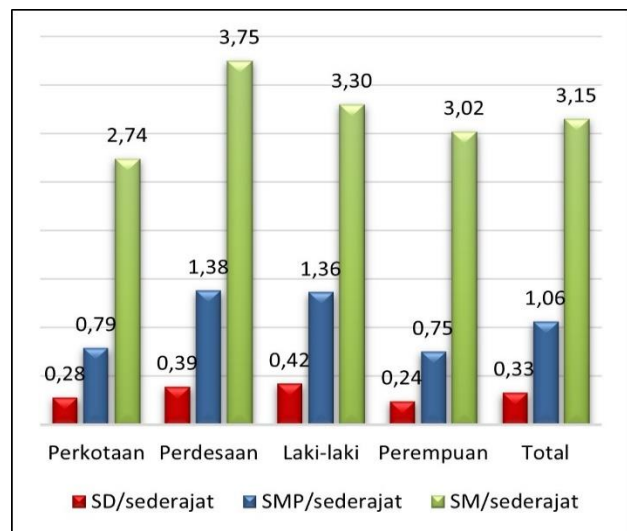
There are quite a lot of children in Indonesia who drop out of school and work at too young age. The results of the National Labor Force Survey (Susenas) conducted by Statistics Indonesia Agency showed that in 2019 there were 39.87 percent of children aged 10-17 years who worked and were no longer in school. In fact, the state regulates through Law No. 13 of 2003 concerning Manpower that children are not allowed to work because it is closely related to the efforts to protect children's human rights. This study aims to look at the socio-demographic characteristics of child labor and the socioeconomic characteristics of child labor households in Indonesia which were obtained through descriptive statistical analysis methods. By using Susenas data for March 2019 and 2020, all variables used are presented in the form of cross tabulations. The results showed that child labor was more in children in the 16-17 year age group than the younger age group, which was 9.24 percent; more male than female, which reached 4.8 percent; and more low education compared to higher education, which is 4.21 percent. Child labor is more commonly found in households with a low level of education of the head of the household those with a high education level, which is 4.91 percent; household with female as the head of the household is higher than those with male, amounted to 5.68 percent; the head of the household who work in the agricultural sector is higher compare to other sectors, which reached 6.03 percent; household in rural areas is higher compare to urban areas, at 5.25 percent; household receiving social protection programs is higher compare to the non-recipients, at 4.82 percent and had the number of household members is more than five people compare to less than five people, which is 4.98. These characteristics would assist the government in developing targeted policies in order to remove children from the labor market.

**Keywords:** child labor, descriptive analysis, child protection, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus disiapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dikarenakan pembangunan suatu negara yang berkualitas tercipta dari sumber daya manusia yang berkualitas pula. Melalui teori *Human Capital Investment*, Schultz menyatakan pendidikan dan pelatihan adalah investasi penting untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang bermanfaat dalam pembangunan (Cazes & Verick, 2013). Salah satu indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pendidikan di suatu wilayah adalah angka putus sekolah. Angka putus sekolah di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah anak umur 7-17 tahun pada tahun 2018 mencapai 0,85

persen. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin besar pula jumlah angka putus sekolah.



**Gambar 1.** Angka Putus Sekolah Anak Umur 7-17 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan, 2018

Sumber: Profil Anak Indonesia 2019

Berbagai faktor dapat menyebabkan anak putus sekolah. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menyebutkan bahwa meski bukan penyebab satu-satunya putus sekolah, alasan ekonomi tetap menjadi faktor dominan yang menyebabkan anak tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, 35,97 persen anak berumur 7-17 tahun tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi karena tidak ada biaya, 14,87 persen dikarenakan harus bekerja/mencari nafkah, dan 1,25 persen disebabkan malu karena ekonomi.

**Tabel 1.** Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah dan Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan dan Jenis Kelamin di Indonesia, 2018

<b>Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah/Tidak Bersekolah Lagi</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak ada biaya	36,52	35,33	35,97
Bekerja/mencari nafkah	16,18	13,34	14,87
Menikah	0,43	12,09	5,82
Mengurus Rumah Tangga	0,99	7,61	4,05
Merasa Pendidikan Cukup	8,45	8,22	8,34
Malu karena ekonomi	1,59	0,85	1,25
Sekolah Jauh	4,38	4,40	4,39
Cacat/Disabilitas	4,55	3,27	3,96
Lainnya	26,91	14,89	21,35
Total	100,0	100,00	100,0

0

0

Sumber: Profil Anak Indonesia 2019

Anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Untuk dapat meningkatkan kualitas anak, pemerintah perlu menyiapkan kebutuhan anak pada masa sekarang, seperti pendidikan. Dengan terpenuhinya hak anak atas pendidikan pada saat ini, sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercipta dan dapat menciptakan pembangunan yang berkualitas pula. Jika pada saat ini, anak tidak mendapatkan pendidikan sepenuhnya, sama artinya dengan mempertaruhkan masa depan bangsa (Kementerian PPPA & BPS, 2019). Oleh karena itu, melindungi dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak adalah tanggung jawab negara agar saat anak memasuki umur produktif dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Pekerja anak merupakan masalah yang serius karena menimbulkan berbagai dampak negatif pada anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuni (2017) yang mengungkapkan pekerja anak erat kaitannya dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya pembangunan fisik, psikologis dan sosial serta pendidikan sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk menduduki bangku sekolah. Anak yang bekerja dapat mencegah mereka untuk memperoleh manfaat dari sekolah dan karenanya dapat membawa mereka ke pekerjaan berupah rendah sehingga terjebak dalam kemiskinan yang terus-menerus (Ray, 2000). Hal ini dikarenakan dengan bekerja, anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hingga akhirnya memiliki pendidikan yang rendah. Selanjutnya dengan pendidikan yang rendah, anak akan memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak hingga akhirnya terperangkap dalam kemiskinan. Selaras dengan hal tersebut, Sasmal & Guillen (2015) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah

penyebab penting dari pekerja anak dan membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk sekolah dan memperoleh keterampilan. Saat tumbuh dewasa, anak-anak tersebut akan menjadi pekerja tidak terampil karena kurangnya pendidikan sehingga mendapat upah rendah di masa depan yang mengakibatkan kemiskinan. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, sumber daya manusia di keluarga akan dimanfaatkan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja, termasuk anak. Dengan demikian, menciptakan jebakan pekerja anak.

Secara normatif, anak-anak tidak diperbolehkan untuk bekerja. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Larangan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya memuat upaya melindungi hak asasi anak (Endrawati, 2011). Tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara". Selanjutnya di dalam ayat (2) menyatakan "hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan". Dalam Pasal 64 diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi yang menyebutkan "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya."

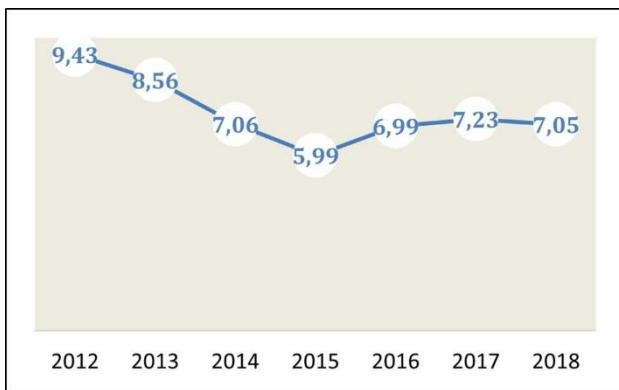
Pemerintah juga melakukan upaya untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak serta menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Faridah & Afiyani (2019) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah bagian dari eksploitasi ekonomi terhadap anak sehingga anak harus dilindungi karena hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak kelangsungan hidup anak. Masa anak-anak adalah masa pertumbuhan sehingga idealnya anak-anak harus dilindungi dari berbagai hal yang dapat membuat pertumbuhannya terganggu (Wahyuni, 2017). Dengan demikian, apapun alasannya anak tidak diperbolehkan untuk bekerja.

Upaya untuk menanggulangi pekerja anak, khususnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, juga menjadi fokus dari pemerintah. Salah satu upaya tersebut tertuang lewat adanya ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Dbolehkan Bekerja melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Rosidah (2012) menyebutkan bahwa kedua konvensi ILO tersebut adalah instrumen internasional yang penting tentang HAM sehingga tindakan mempekerjakan anak termasuk dalam pelanggaran HAM.

Meski segala bentuk aturan telah ditetapkan, bukan jaminan bahwa keberadaan anak bekerja dapat hilang begitu saja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan terdapat 7,05 persen anak berumur 10-17 tahun yang

bekerja pada tahun 2018. Perkembangan persentase anak yang bekerja di Indonesia mengalami fluktuasi seperti yang terlihat pada Gambar 2. Pada tahun 2012, persentase anak berumur 10-17 tahun yang bekerja mencapai 9,43 persen. Angka tersebut terus mengalami penurunan sampai tahun 2015, di mana persentase anak berumur 10-17 tahun yang bekerja sebesar 5,99 persen. Turunnya persentase anak yang bekerja ini sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi tahunan terendah selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 4,88 persen. Namun, kembali meningkat sampai tahun 2017, yang akhirnya turun tipis menjadi 7,05 persen pada tahun 2018. Meskipun mengalami penurunan, masih adanya anak yang bekerja perlu mendapat perhatian dari pemerintah.



**Gambar 2.** Perkembangan Persentase Anak Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja, 2012-2018

Sumber: *Profil Anak Indonesia 2019*

Tulisan ini menggunakan data mentah hasil Susenas Maret 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh BPS. Meskipun BPS juga melakukan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang khusus dilakukan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan di Indonesia, namun ketika penelitian ketenagakerjaan dikaitkan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan demografi, informasi yang tersedia dalam Sakernas tidak mencukupi (Usman & Nachrowi, 2004). Selain itu, pada dasarnya, Susenas juga dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas (BPS, 2012). Susenas merupakan survei rutin yang dilakukan oleh BPS untuk memberikan data kemajuan pembangunan di bidang sosial ekonomi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, sampel Susenas Maret 2020 mencakup 320.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Selengkapnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

No.	Variabel	Definisi Operasional	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anak Bekerja	Penduduk berusia 10-17 tahun yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Termasuk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, menunggu panen, tugas belajar atau mogok kerja.	1. Bekerja 2. Tidak bekerja
2.	Umur Anak	Umur merupakan lama waktu yang telah dijalani oleh penduduk berumur 10-17 tahun yang dihitung sejak kelahiran sampai saat pencacahan dilakukan. Dalam Susenas, umur dihitung dalam	1. Kelompok Umur 10-12 tahun 2. Kelompok Umur 13-15 tahun

		tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.	3. Kelompok Umur 16-17 tahun
3.	Jenis Kelamin Anak	Jenis kelamin anak merupakan pembeda anak secara biologis.	1. Laki-laki 2. Perempuan
4.	Tingkat Pendidikan Anak	Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti oleh anak digunakan sebagai pendekatan tingkat pendidikan anak. Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh anak yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh anak yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket A/B/C). digunakan sebagai pendekatan tingkat pendidikan anak.	1. Rendah, jika jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti SMP sederajat ke bawah. 2. Tinggi, jika jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti SMA sederajat ke atas.
5.	Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti oleh kepala rumah tangga digunakan sebagai pendekatan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.	1. Rendah, jika jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti SMP sederajat ke bawah. 2. Tinggi, jika jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti SMA sederajat ke atas.
6.	Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	Jenis kelamin kepala rumah tangga merupakan pembeda kepala rumah tangga secara biologis.	1. Laki-laki 2. Perempuan
7	Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga	Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat kepala rumah tangga bekerja.	1. Pertanian, untuk kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, dalam hal ini pertanian termasuk Pertanian Tanaman Padi dan Palawija, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pertanian Lainnya 2. Non Pertanian, untuk kepala rumah tangga yang bekerja di sektor selain pertanian 3. Tidak Bekerja, untuk kepala rumah tangga yang statusnya tidak bekerja

8	Akses rumah tangga terhadap Program perlindungan sosial	Perlindungan sosial merupakan program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah untuk masyarakat miskin seperti bantuan tunai terkait, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan, dan bantuan pemerintah daerah.	1. rumah penerima program perlindungan social 2. rumah tangga bukan penerima program perlindungan sosial.
9	Jumlah anggota rumah tangga	Jumlah anggota rumah tangga merupakan jumlah seluruh orang yang biasa tinggal di rumah tangga, di mana pengelolaan kepengurusan makannya dari satu dapur.	1. ≤ 5 orang 2. > 5 orang
10	Daerah tempat tinggal rumah tangga	Daerah tempat tinggal rumah tangga merupakan klasifikasi lokasi tempat tinggal mengacu pada konsep perkotaan dan perdesaan BPS.	1. Perdesaan 2. perkotaan

Unit analisis dalam kajian ini adalah seluruh anak, yaitu mereka yang berumur di bawah 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pengumpulan data ketenagakerjaan dalam Susenas menggunakan batasan umur 10 tahun ke atas sehingga konsep anak yang digunakan dalam kajian ini adalah mereka yang berumur 10 – 17 tahun.

Berdasarkan *International Conference of Labour Statistician (ICLS)* ke-13, konsep dan definisi tentang bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Termasuk kegiatan bekerja, yaitu sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, menunggu panen, tugas belajar atau mogok kerja. Istilah tenaga kerja tidak ada dalam pengukuran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPS. BPS menggunakan konsep angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sesuai dengan ICLS 13. Istilah tenaga kerja dalam kajian ini mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 2, yang

menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Kajian ini menyajikan karakteristik sosial demografi tenaga kerja anak dan sosial ekonomi rumah tangga tenaga kerja anak di Indonesia. Untuk mewakili karakteristik sosial demografi tenaga kerja anak digunakan variabel umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan anak. Sementara untuk mewakili karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, digunakan variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, lapangan usaha pekerjaan utama kepala rumah tangga, akses rumah tangga terhadap perlindungan sosial, jumlah anggota rumah tangga, dan daerah tempat tinggal.

## PEMBAHASAN

### Tenaga Kerja Anak di Indonesia

Pada Tabel 2, hasil olah data Susenas Maret 2020 menunjukkan jumlah anak yang bekerja nilainya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan anak yang tidak bekerja. Persentase anak yang bekerja adalah sebesar 3,86 persen (1,4 juta jiwa), sedangkan anak yang

tidak bekerja mencapai 96,14 persen (35 juta jiwa). Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi 2019 yang mencapai 4,02 persen. Meskipun demikian, masih adanya anak yang bekerja mencerminkan diperlukannya upaya yang lebih keras untuk memenuhi target bebas pekerja anak pada tahun 2022. Hal tersebut juga dapat menjadi indikasi bahwa masih adanya anak-anak yang belum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya

**Tabel 2.** Distribusi Anak Menurut Status Bekerja dan Tidak Bekerja di Indonesia, 2019-2020

Tahun	Status Bekerja Anak	
	Bekerja	Tidak Bekerja
(1)	(3)	(4)
<b>2020</b>	3,86	96,14
<b>2019</b>	4,02	95,98

Sumber: Susenas Maret 2019-2020, diolah

Namun, Irwanto (1999) dalam Usman dan Nachrowi (2004) menyebutkan bahwa kecilnya persentase anak bekerja dapat disebabkan tidak tercatatnya anak-anak yang bekerja dalam sektor-sektor yang kurang mencolok sebagai aktivitas ekonomi, seperti pekerjaan domestik, menggembalakan ternak, dan lainnya. Kegiatan tersebut tidak masuk ke dalam cakupan aktivitas bekerja dalam pengumpulan data ketenagakerjaan di beberapa negara termasuk Indonesia.

Merujuk pada Tabel 3, secara total sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh tenaga kerja anak, yaitu sebesar 41,73 persen pada tahun 2020. Proporsi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 38,49 persen. Kegiatan

pertanian merupakan lapangan usaha yang tidak mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu sehingga siapa saja dapat dengan mudah untuk memasukinya, termasuk tenaga kerja anak. Lebih lanjut, ILO (2011) menambahkan bahwa anak tetap harus bekerja di sektor pertanian dikarenakan terbatasnya akses ke pendidikan yang berkualitas, teknologi pertanian yang tidak memadai serta kurangnya akses tenaga kerja orang dewasa.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, mayoritas anak laki-laki bekerja di sektor pertanian. Hal ini terlihat proporsi anak laki-laki yang bekerja di sektor ini hampir mencapai separuhnya. Pada tahun 2019, proporsi anak laki-laki yang bekerja di sektor pertanian mencapai 45,13 persen dan kemudian meningkat menjadi 48,20 persen pada tahun 2020. Sifat pekerjaan pada kegiatan pertanian yang membutuhkan banyak tenaga membuat lebih banyak dikerjakan oleh anak laki-laki. Hermanus dkk (2021) mengungkapkan jenis pekerjaan pada anak laki-laki di sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan tembakau, dipekerjakan pada beberapa tahap sekaligus dan lebih berat. Sementara itu, sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti tenaga kerja anak laki-laki berikutnya. Meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019, sektor ini mampu menyerap 20,84 persen tenaga kerja anak laki-laki pada tahun 2020.

Meski secara total pertanian merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti tenaga kerja anak, sektor non pertanianlah yang paling banyak digeluti tenaga kerja perempuan, yaitu sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi sebesar 42,31 persen pada tahun 2020. Proporsi tenaga kerja anak perempuan yang bekerja di sektor ini mengalami penurunan sebesar 1,53 persen jika dibandingkan tahun 2019. Sektor pertanian justru mengalami



peningkatan proporsi tenaga kerja anak perempuan pada tahun 2020.

**Tabel 3.** Perbandingan Persentase Anak Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Indonesia, 2019-2020

Jenis Kelamin Pekerja Anak	Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listri, Gas dan Air Minum	Konstruksi	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	Lemba ga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
Laki-laki	2019	45,13	1,86	11,16	0,34	7,11	22,02	4,46	0,44	7,48
	2020	48,20	1,79	10,11	0,66	7,79	20,84	2,94	0,56	7,11
Perempuan	2019	26,88	0,34	15,67	0,19	0,63	43,84	1,35	0,27	10,84
	2020	29,92	0,16	14,11	0,18	0,35	42,31	0,82	0,15	11,99
Total	2019	38,49	1,31	12,80	0,29	4,75	29,96	3,33	0,38	8,70
	2020	41,73	1,22	11,53	0,49	5,16	28,43	2,19	0,42	8,84

Sumber: Susenas Maret 2019-2020, diolah

Jika ditelisik lebih dalam, pada tahun 2020 anak yang bekerja pada sektor non pertanian mayoritas bekerja pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebesar 28,43 persen, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 11,53 persen dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 8,84 persen. Pola ini pun tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2019. Berbeda dengan sektor pertanian yang lebih didominasi oleh anak

laki-laki, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, industri pengolahan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lebih banyak dimasuki oleh anak perempuan.

Status pekerjaan anak adalah kedudukan anak dalam melakukan usaha atau pekerjaan di tempatnya bekerja. Terlihat pada Tabel 4, pada tahun 2020 lebih dari tiga perempat anak bekerja di sektor pertanian, sebagai pekerja

keluarga/tidak dibayar, kemudian diikuti oleh status buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 10,71 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, proporsi anak bekerja di sektor pertanian sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar lebih kecil, yaitu sebesar 71,37 persen. Sebaliknya jika dibandingkan dengan tahun 2019, proporsi anak bekerja di sektor pertanian dengan status buruh/karyawan/pegawai lebih besar, yaitu sebesar 11,46 persen.

Berkebalikan dengan sektor pertanian, anak yang bekerja di sektor non pertanian didominasi buruh/karyawan/pegawai, yaitu mencapai 46,29 persen pada tahun 2020. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 49,50 persen. Kemudian diikuti oleh status pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu 35,95 persen pada tahun 2020 dan sebesar 32,71 persen pada tahun 2019.

Fitzsimons (2007) menunjukkan bahwa banyaknya pekerja anak dalam pekerjaan rumah

tannga dan kegiatan pertanian salah satunya disebabkan oleh masih belum berfungsinya pasar tenaga kerja dengan baik. Tidak adanya pasar tenaga kerja dan tanah yang sempurna maka pemilik aset pertanian yang tidak mampu menyewa tenaga kerja produktif akan memiliki insentif untuk mempekerjakan anggota keluarganya, khususnya anak. Sementara itu, apabila pasar tenaga kerja dan tanah sempurna maka pemilik aset pertanian akan memperkerjakantenaga kerja dewasa dan mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah. Selain itu, penggunaan teknologi pada sektor pertanian Indonesia juga masih belum terlalu tinggi sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan cenderung tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus (Nurdiyanto, 2020). Oleh karenanya, tenaga kerja anak yang masih minim keahlian dan keterampilan dapat dengan mudahnya masuk ke sektor pertanian.

**Tabel 4.** Perbandingan Persentase Anak Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan di Indonesia, 2019-2020

Lapangan Usaha Pekerja Anak	Tahun	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	Buruh/Karyawan/Pegawai	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/tidak dibayar
<b>Pertanian</b>	2019	4,99	0,33	0,01	11,46	11,84	71,37
	2020	5,45	0,39	0,03	10,71	7,49	75,93
<b>Non Pertanian</b>	2019	8,10	0,13	0,02	49,50	9,54	32,71
	2020	7,68	0,56	0,03	46,29	9,49	35,95
<b>Total</b>	2019	6,90	0,21	0,01	34,86	10,43	47,59
	2020	6,75	0,49	0,03	31,44	8,66	52,64

Sumber: Susenas Maret 2019-2020, diolah

## Karakteristik Sosial Demografi Tenaga Kerja Anak

Selanjutnya Tabel 5 di bawah memperlihatkan karakteristik sosial demografi tenaga kerja anak yang dilihat dari umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan anak. Berdasarkan kelompok umur, baik pada tahun 2019 maupun 2020, persentase tenaga kerja anak paling tinggi terdapat pada anak dengan kelompok umur paling tua, yaitu kelompok umur 16-17 tahun. Semakin tinggi kelompok umurnya, semakin besar pula persentase tenaga kerja anak. Hal tersebut sejalan dengan Ali dan Arabsheibani (2016) yang menyebutkan kecenderungan anak yang lebih tua untuk masuk ke pasar tenaga kerja lebih tinggi daripada anak yang muda. Sementara persentase anak yang tidak bekerja paling tinggi terdapat pada anak yang berumur 10-12 tahun, yaitu 99,12 persen. Hal tersebut dapat dipahami bahwa anak dengan kelompok umur muda banyak yang masih menjalani pendidikan.

Hasil tabulasi silang antara status bekerja anak dengan jenis kelamin menunjukkan bahwa tenaga kerja anak laki-laki memiliki proporsi yang lebih besar (4,86 persen) dibandingkan anak perempuan (2,81 persen) pada tahun 2020. Pola tersebut juga telah terjadi pada tahun 2019, di mana tenaga kerja anak laki-laki mencapai 4,97 persen dan tenaga kerja anak perempuan mencapai 3,01 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rad, Gholampoor, & Jaafaripooyan (2015) serta Putnick & Bonstein (2016) yang mengemukakan bahwa partisipasi tenaga kerja anak berdasarkan jenis kelamin berbeda menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Secara total, lebih banyak tenaga kerja anak laki-laki dibandingkan tenaga kerja anak perempuan. Akan tetapi, lebih banyak anak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga daripada anak laki-laki, seperti membersihkan rumah, mengambil air dan kayu, mencuci, dan lainnya.

Purwanti (2014) menambahkan bahwa adanya sistem sosial patriarki yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia menempatkan nilai anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, demikian juga dalam hal tanggung jawab. Jika anak tetap harus bekerja, maka anak laki-laki akan bertanggung jawab untuk bekerja dengan orientasi pasar (bekerja untuk memperoleh upah), sedangkan anak perempuan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, anak yang berpendidikan rendah memiliki persentase untuk bekerja lebih tinggi (4,21 persen) dibandingkan anak yang berpendidikan tinggi (3,15 persen). Pendidikan yang rendah erat kaitannya dengan keahlian dan ketrampilan yang tidak memadai. Akibatnya pekerjaan yang dapat dikerjakan juga hanya terbatas pada jenis pekerjaan tertentu.

**Tabel 5.** Persentase Status Bekerja Anak Menurut Karakteristik Sosial Demografi di Indonesia, 2019-2020

\	Karakteristik	Status Bekerja Anak	
		Bekerja	Tidak Bekerja
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Umur Anak</b>			
<b>2020</b>	10-12 tahun	0,88	99,12
	13-15 tahun	3,46	96,54
	16-17 tahun	9,24	90,76
<b>2019</b>	10-12 tahun	0,85	99,15
	13-15 tahun	3,47	96,53
	16-17 tahun	9,99	90,01
<b>Jenis Kelamin Anak</b>			

\	Karakteristik	Status Bekerja Anak	
		Bekerja	Tidak Bekerja
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	Laki-laki	4,86	95,14
	Perempuan	2,81	97,19
2019	Laki-laki	4,97	95,03
	Perempuan	3,01	96,99
<b>Tingkat Pendidikan Anak</b>			
2020	Rendah	4,21	95,79
	Tinggi	3,15	96,85
2019	Rendah	4,01	95,99
	Tinggi	4,05	95,95

Sumber: Susenas Maret 2019 - 2020, diolah

### Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Tenaga Kerja Anak

Pada Tabel 6 terlihat bahwa pada tahun 2019, 4,99 persen tenaga kerja anak berasal dari rumah tangga yang kepala rumah tangga berpendidikan rendah, yaitu SMP/ sederajat ke bawah. Angka ini menurun menjadi 4,91 persen pada tahun 2020. Tingginya proporsi tenaga kerja anak pada rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah diduga karena kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki kesadaran akan pendidikan untuk anggota keluarga terutama anak mereka, juga rendah. Mereka cenderung tidak memprioritaskan pendidikan anak-anaknya namun memilih untuk melibatkan anak-anaknya ke pasar tenaga kerja. Sementara orang tua yang berpendidikan tinggi menilai waktu anak untuk sekolah akan memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan jika waktu anak untuk bekerja. Hal ini selaras dengan Iryani & Priyarsono (2013) menjelaskan bahwa semakin

rendah pendidikan kepala rumah tangga menandakan semakin tinggi kerentanan ekonomi rumah tangga tersebut sehingga menjadi dorongan yang kuat untuk melibatkan anaknya dalam bekerja. Sementara kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap partisipasi sekolah daripada bekerja (Canagarajah & Coulombe, 1997). Oleh karena itu, orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung mengurangi waktu kerja anaknya (Purwanti, 2014).

Berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga, pada tahun 2020 persentase tenaga kerja anak tinggal dalam rumah tangga yang kepala rumah tangganya laki-laki mencapai 3,64 persen. Sementara persentase tenaga kerja anak tinggal dalam rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan lebih tinggi, yaitu sebesar 5,68 persen. Di tahun 2019 juga menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja anak lebih tinggi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan. Diduga kepala rumah tangga perempuan terpaksa menggunakan pekerja anak karena berada di bawah tekanan ekonomi karena suaminya telah meninggal atau telah pergi baik secara permanen atau sementara. Selaras dengan hal tersebut, PEKKA & SMERU (2014) dalam laporannya mencatat angka pekerja anak pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan anak yang berada pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya laki-laki. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan secara signifikan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengirim anak-anak mereka bekerja daripada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki karena rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan lebih rentan dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (Suryahadi et al., 2005).

**Tabel 6.** Persentase Status Bekerja Anak Menurut Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Indonesia, 2019-2020

Tahun	Karakteristik	Status Bekerja Anak	
		Bekerja	Tidak Bekerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Pendidikan KRT			
2020	Tinggi	2,18	97,82
	Rendah	4,91	95,09
2019	Tinggi	2,26	97,74
	Rendah	4,99	95,01
Jenis Kelamin KRT			
2020	Laki-laki	3,64	96,36
	Perempuan	5,68	94,32
2019	Laki-laki	3,78	96,22
	Perempuan	6,02	93,98
Lapangan Usaha Pekerjaan Utama KRT			
2020	Non Pertanian	2,85	97,15
	Pertanian	6,03	93,97
	Tidak Bekerja	3,75	96,25
2019	Non Pertanian	3,08	96,92
	Pertanian	6,26	93,74
	Tidak Bekerja	3,24	96,76
Akses Rumah Tangga terhadap Program Perlindungan Sosial			
2020	Tidak Menerima	3,25	96,75
	Menerima	4,82	95,18
2019	Tidak Menerima	3,44	96,56
	Menerima	4,96	95,04

Tahun	Karakteristik	Status Bekerja Anak	
		Bekerja	Tidak Bekerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Anggota Rumah Tangga			
2020	≤ 5 orang	3,45	96,55
	> 5 orang	4,98	95,02
2019	≤ 5 orang	3,55	96,45
	> 5 orang	5,32	94,68
Klasifikasi Tempat Tinggal			
2020	Perkotaan	2,68	97,32
	Perdesaan	5,25	94,75
2019	Perkotaan	2,97	97,03
	Perdesaan	5,31	94,69

Sumber: Susenas Maret 2019-2020, diolah

Selanjutnya, dilihat dari lapangan usaha pekerjaan utama kepala rumah tangga, 6,03 persen tenaga kerja anak berasal dari rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor pertanian. Utama & Handayani (2020) juga menemukan hasil yang sama di mana kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian akan meningkatkan peluang anak untuk bekerja. Hal tersebut juga sejalan dengan dominannya tenaga kerja anak di sektor pertanian sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar, yang sudah dibahas sebelumnya. Tenaga kerja anak yang berada pada rumah tangga dengan pekerjaan utama kepala rumah tangganya di sektor non pertanian sebesar 2,85 persen. Selain itu, terdapat sebesar 3,75 persen tenaga kerja anak walaupun kepala rumah tangganya tidak memiliki pekerjaan.

Karakteristik rumah tangga berikutnya adalah akses rumah tangga terhadap program perlindungan sosial. Tenaga kerja anak yang berada dalam rumah tangga penerima program perlindungan sosial memiliki persentase lebih

tinggi (4,82 persen) dibandingkan tenaga kerja anak yang berada dalam rumah tangga bukan penerima program perlindungan sosial (3,25 persen). Lebih tinggi proporsi tenaga kerja anak yang berada dalam rumah tangga penerima program perlindungan sosial dapat dikatakan bahwa tenaga kerja anak berasal dari rumah tangga miskin. Hal ini disebabkan bahwa rumah tangga penerima program perlindungan sosial adalah rumah tangga miskin yang menjadi sasaran pemerintah. Berbagai program perlindungan sosial telah digulirkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, antara lain Beras Sejahtera (Rastra), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pemerintah Daerah, dan lainnya. Penelitian Hidayatina & Garces-Ozanne (2019) menemukan bahwa program PKH, secara signifikan mengurangi probabilitas anak-anak bekerja. Penelitian Syukri, et. al. (2018) juga menunjukkan PKH berhasil meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya pendidikan dan bahayanya menjadi pekerja anak di Sukabumi dan Cianjur. Namun, pengetahuan tersebut belum dapat diwujudkan menjadi tindakan dengan mengeluarkan anak dari pasar tenaga kerja. Pemberian program perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin tidak serta merta secara langsung memberikan pengaruh kepada rumah tangga untuk mengeluarkan anaknya dari pasar tenaga kerja.

Berdasarkan jumlah anggota rumah tangga, tenaga kerja anak mayoritas berasal dari rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga lebih dari lima orang yaitu sebesar 4,98 persen. Lima orang anggota rumah tangga diambil dari rata-rata jumlah kebutuhan rumah tangga sangat ditentukan oleh jumlah anggota rumah tangga. Semakin banyak anggota rumah tangga, makin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi, begitu sebaliknya. Oleh karena

itu, jumlah anggota rumah tangga rentan menimbulkan kekurangan sehingga dapat berdampak terbaikannya kebutuhan anak, khususnya pendidikan.

Masih berdasarkan Tabel 6, persentase tenaga kerja anak juga berbeda antara anak yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Perdesaan masih menjadi kantung dengan proporsi tenaga kerja anak lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan, baik pada tahun 2019 maupun 2020. Tenaga kerja anak di perkotaan pada tahun 2020 memiliki proporsi yang lebih rendah (2,68 persen) daripada anak yang tinggal di perdesaan (5,25 persen). Sejalan dengan hal tersebut, Tang, Zhao, & Zhao (2018) menyebutkan bahwa anak yang tinggal di daerah perkotaan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menjadi pekerja anak. Berdasarkan rilis data yang dilakukan oleh BPS, angka kemiskinan pada Maret tahun 2020 di daerah perdesaan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 7,38 persen dan 12,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah perdesaan cenderung lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan karena melalui angka kemiskinan dapat dilihat tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Implikasi dari hal tersebut menyebabkan lebih banyak anak di daerah perdesaan yang bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.

## **PENUTUP**

Hasil olah data Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa proporsi anak yang bekerja di Indonesia adalah sebesar 3,86 persen. Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa dari karakteristik sosial demografinya, tenaga kerja anak lebih banyak pada anak yang berumur lebih tua, berjenis kelamin laki-laki, dan berpendidikan rendah. Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangganya, tenaga kerja

anak lebih banyak dijumpai pada rumah tangga dengan pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, berjenis kelamin perempuan, bekerja di sektor pertanian, berada di daerah perdesaan, menerima program perlindungan sosial, dan memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih dari lima orang. Karakteristik tenaga kerja anak ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2019, namun proporsi menunjukkan penurunan pada tahun 2020.

Berdasarkan temuan hasil kajian dapat diduga bahwa karakteristik tenaga kerja anak didominasi pada rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin adalah yang paling rentan memunculkan pekerja anak sehingga perlu mendapat prioritas dalam intervensi. Oleh sebab itu kebijakan yang dapat diambil adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Pemberian bantuan, baik bahan pangan, kredit usaha, maupun pengembangan keterampilan serta pemberdayaan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan membantu menjalankan kegiatan ekonomi keluarga sehingga rumah tangga tidak perlu memberdayakan anak untuk mencari penghasilan.

Selain itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan tentang pentingnya hak anak dan perlindungannya sehingga dapat mencegah terjadinya keterlibatan anak dalam pasar tenaga kerja

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung dalam penyelesaian penulisan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Dayang Haszelinna b. A., dan Arabsheibani, G. Reza. (2016). *Child Labour in Indonesia:*

*Supply-Side Determinants. Economic and Finance in Indonesia*, 62(3), 162-179.

Badan Pusat Statistik. (2012). *Indonesia - Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 (Gabungan)*. Diakses melalui <https://mikrodata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/633>

Canagarajah, S., & Coulombe, H. (1997). *Child Labor and Schooling in Ghana*. In *Policy Research Working Paper (No. 1844)*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-1844>

Cazes, Sandrine & Verick, Sher. (Editor). 2013. *Perspective on Labour Economics for Development*. Geneva: ILO

Endrawati, Netty. (2011). *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya (Studi Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol April 2011.

Faridah, Siti & Afyani, Laila (2019). *Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia*. *Lex Scientia Law Review*, Vol 2 (2), 163-176.

Fitzsimons, E. (2007). "The Effects of Risk on Education in Indonesia". Institute for Fiscal Studies. *Journal of Economic Development and Cultural Change*. Volume, issue, pages: Vol. 56, No. 1, pp. 1-25

Hermanus, Emmy. (2021). *Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat)*. Laporan Penelitian. Jakarta: SMERU

Hidayatina, Achsanah dan Garces-Ozanne, Arlene. (2019). *Can cash transfers mitigate child labour? Evidence from Indonesia's cash transfer programme for poor students in Java*. *World Development Perspectives*, Vol 15, 1-14. Doi: [doi.org/10.1016/j.wdp.2019.100129](https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.100129)

ILO. (2011). *Agriculture: An Engine of Pro-Poor Rural Growth*. Rural Policy Brief. ILO

- Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia*, 13(2), 177–195. <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i2.226>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Nurdiyanto, Eka. (2020). *Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Pemuda Pada Sektor Pertanian Di Indonesia*. (Tesis Universitas Gadjah Mada)
- PEKKA dan SMERU. (2014). *Menguak Keberadaan Dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU
- Purwanti, Putu Ayu Pramitha. (2014). Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Desa dan Kota terhadap Alokasi Waktu Anak untuk Bekerja di Indonesia. *Piramida*, Vol 10 (2), 86-93.
- Putnick, Diane L., dan Bonstein, March H. (2016). Girls 'and Boys 'Labor And Household Chores In Low- And Middle-Income Countries. *Monogr Soc Res Child Dev*, 81(1), 104–122. Doi: 10.1111/mono.12228.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Rad, Enayatollah Homaie., Gholampoor, Hanie., dan Jaafaripooyan, Ebrahim. (2015). Child Labor and the Influencing Factors: Evidence from less Developed Provinces of Iran. *Iran J Public Health*, 44(9), 1244-1252
- Ray, R. (2000). Child labor, child schooling, and their interaction with adult labor: Empirical evidence for Peru and Pakistan. *The World Bank Economic Review*, 14(2), 347–367. <https://doi.org/10.1093/wber/14.2.347>
- Rosidah, Idah. (2012, Mei). *Quo Vadis Pekerja Anak Dalam Tinjauan Hukum*. Diakses dari <https://lbhyogyakarta.org>.
- Sasmal, Joydeb dan Guillen, Jorge. (2015). Poverty, Educational Failure, and the Child-Labour Trap: The Indian Experience. *Global Business Review*, Vol 16 (2), 270-280. Doi: <https://doi.org/10.1177/0972150914564419>
- Suryahadi, A., Priyambada, A., & Sumarto, S. (2005). What Happened to Child Labor in Indonesia during the Economic Crisis: The Trade-off between School and Work. In SMERU Working Paper. <https://smeru.or.id/en/content/what-happened-child-labor-indonesia-during-economic-crisis-trade-between-school-and-work>
- Syukri, Muhammad dkk. (2018) Exploratory Study on the Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) Program with a Child Labor Component Support in Sukabumi and Cianjur – West Java. SMERU Research Report
- Tang, Can., Zhao, Liqiu., dan Zhao, Zhong. (2018). Child labor in China. *China Economic Review*, Vol 51, 149-166
- Usman, Hardius. & Nachrowi, N.D. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Utama, Resa Surya dan Handayani, Dwini. (2020). Pekerja Anak di Indonesia : Peran Penawaran dan Permintaan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13(1), 145-157.
- Wahyuni, Indar. (2017). Meningkatkan Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah). *Wahana Akademika*, Vol 4 (1), 45-61. Doi: 10.21580/wa.v4i1.1478